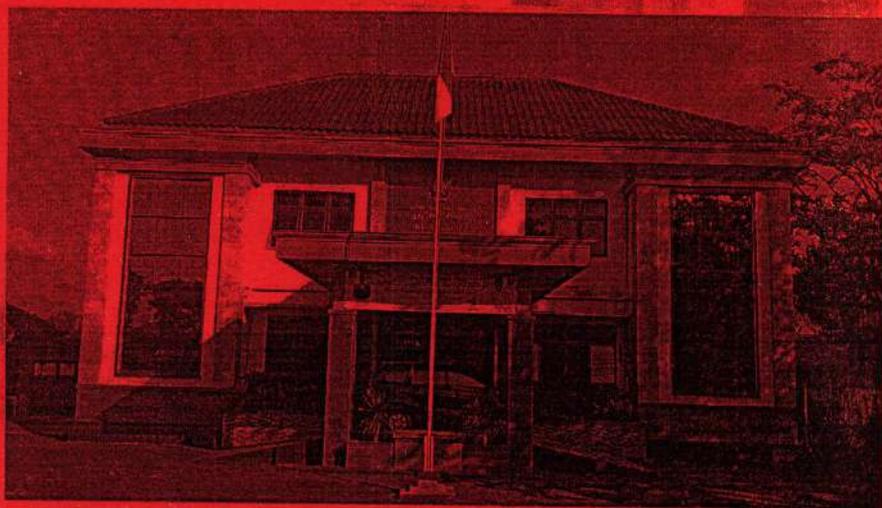




**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2022**



**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2022**

HALAMAN VERIFIKASI

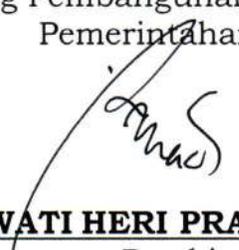
RENCANA KERJA KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2023

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



PUTRI UTAMI RAHMANIA, ST

Penata Tk.I

NIP. 19910316 201503 2 003

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kranggan Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 pada Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Kranggan.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 bisa menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Kranggan, 4 Juli 2022

CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH

NIP. 19660428 199803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Verifikasi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2023.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Kecamatan Kranggan tahun 2019-2023	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan..	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	54
2.7 Penghargaan.....	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	56
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kranggan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	59
4.1 Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung	59
BAB IV PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan s/d Tahun 2021.
- Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kranggan.
- Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023.
- Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Tabel 2.6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah.
- Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2023.
- Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

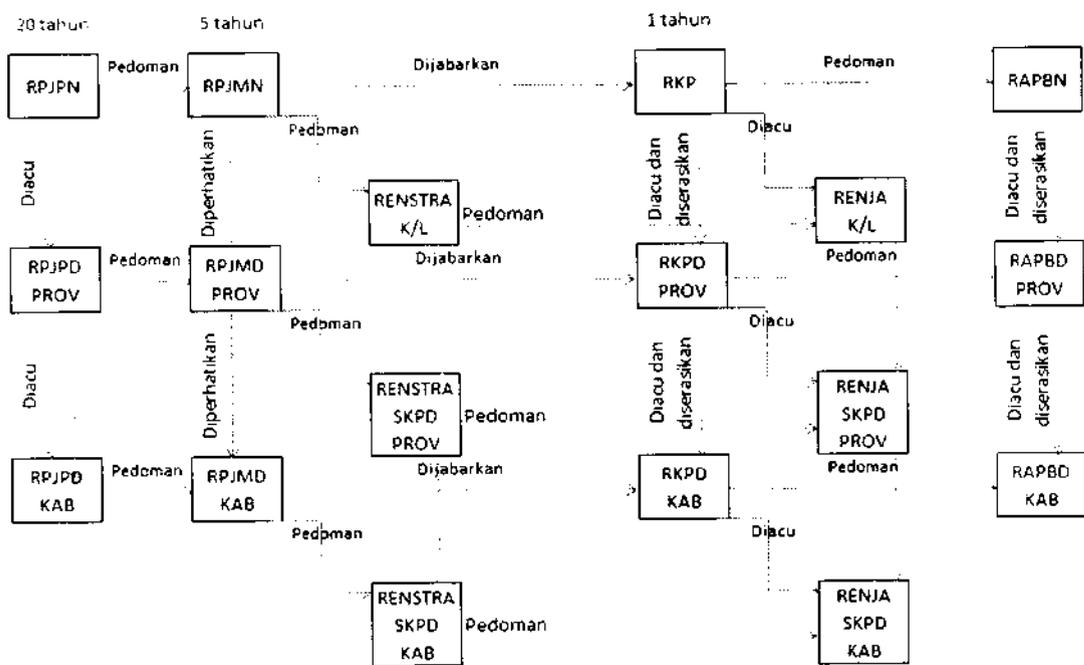
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kranggan

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kranggan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPd. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kranggan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kranggan;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kranggan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Kranggan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kranggan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kranggan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kranggan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kranggan.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kranggan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Kecamatan Kranggan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kranggan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Kecamatan Kranggan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Kecamatan Kranggan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Kranggan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Kranggan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Kranggan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Kranggan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Kranggan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kranggan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kranggan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kranggan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Kranggan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kranggan. Namun dalam proses ini Kecamatan Kranggan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kranggan;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kranggan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kranggan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kranggan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kranggan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2023****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kranggan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun kedua pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Kranggan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan
 s.d Tahun 2021

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 s.d TRIWULAN IV
 KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No/Code	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Bidang / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021												Realisasi 2021			Capaian 2021		
					K	Rp (REKJA)	Rp (DPA)	I			II			III			IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
7.01.01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	2.596.567.987	2.605.531.249	100	527.327.416	100	347.656.488	100	1.003.536.703	100	570.311.545	100	2.416.269.085	100	2.416.269.085	100	2.416.269.085	100	2.416.269.085		
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	2.380.915.837	2.445.991.913	3	516.163.471	5	309.892.565	3	969.093.142	3	525.589.228	14	2.370.738.806	100	2.370.738.806	100	2.370.738.806	100	2.370.738.806		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	5.000.000	3.136.400	3	21.500	3	3.159.548	3	3.105.200	3	6.832.650	12	21.792.848	100	21.792.848	100	21.792.848	100	21.792.848		
7.01.01.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	9.000.000	7.995.248	3	392.000	3	559.000	3	2.003.900	3	3.558.350	12	6.513.250	100	6.513.250	100	6.513.250	100	6.513.250		
7.01.01.2.06.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaian Kantor	bulan	12	5.000.000	4.999.950	3	586.700	3	517.800	3	970.100	3	330.500	12	2.355.100	100	2.355.100	100	2.355.100	100	2.355.100		
7.01.01.2.06.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Fasilitas Kunjungan Tamu	bulan	12	20.000.000	10.944.000	3	1.053.000	3	783.000	3	1.944.000	3	2.964.000	12	6.744.000	100	6.744.000	100	6.744.000	100	6.744.000		
7.01.01.2.06.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	30.000.000	19.831.000	3	1.271.248	3	1.781.550	3	1.781.550	3	22.823.067	12	3.052.795	100	3.052.795	100	3.052.795	100	3.052.795		
7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	170.652.100	85.136.138	3	6.352.245	3	31.411.475	3	19.363.311	3	510.000	12	57.227.031	100	57.227.031	100	57.227.031	100	57.227.031		
7.01.01.2.08.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	28.652.100	995.000	3	135.000	3	225.000	3	510.000	3	30.000	12	900.000	100	900.000	100	900.000	100	900.000		
7.01.01.2.08.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	15.000.000	12.600.000	3	491.045	3	2.925.181	3	1.889.711	3	2.605.401	12	7.891.338	100	7.891.338	100	7.891.338	100	7.891.338		
7.01.01.2.08.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	bulan	12	7.000.000	4.910.400	3	150.000	3	755.000	3	235.000	3	3.770.400	12	4.910.400	100	4.910.400	100	4.910.400	100	4.910.400		
7.01.01.2.08.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	70.000.000	66.630.738	3	5.576.200	3	27.526.294	3	16.728.600	3	16.217.266	12	66.048.360	100	66.048.360	100	66.048.360	100	66.048.360		
7.01.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bulan	12	28.000.000	27.492.600	3	2.780.000	3	3.198.500	3	3.145.500	3	15.246.400	12	26.550.400	100	26.550.400	100	26.550.400	100	26.550.400		

No. Urut	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021		Realisasi per Triwulan Tahun 2021												Capaian 2021	
					K	Fz (RENJA)	I			II			III			IV			K	Fz
							K	Rp (Rp)	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%		
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Anggaran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	12	16.000.000	18.497.100	3	2.760.000	3	3.198.500	3	5.325.500	3	6.250.500	12	17.554.500	100	94,91	
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	10.000.000	8.995.500	3		3		3		3	8.995.500	12	8.995.500	100	100	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																				
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				84.698.000	114.669.580		1.843.815		938.500		2.063.305		102.886.875		107.732.505		93,95	
			Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100			99,52			99,52				99,70				99,70	
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100			53,39			95,31				96,93				96,93	
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				14.698.000	12.697.705		1.843.825		938.500		2.063.305		915.000		5.760.630			
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : peretaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan Paten	bulan	12	14.698.000	12.697.705	3	1.843.825	3	938.500	3	2.063.305	3	915.000	12	5.760.630	100	45,37	
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat				70.000.000	101.971.875								101.971.875		101.971.875			
7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	bulan	12	70.000.000	101.971.875	3		3					101.971.875	12	101.971.875	100	100	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																				
7.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				10.000.000	16.727.005		6.000.000		5.368.050		2.297.405		1.013.800		16.678.255		99,71	
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100			100			100				100				100	
			Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	100			100			100				100				100	
			Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif	%	100			100			100				100				100	
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		

RENJA 2023 [KECAMATAN KRANGGAN]

No. Menor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Satuan	Target 2023				Realisasi per Triwulan Tahun 2021												Capaian 2021																									
				RE (RENJA)		Rp (CPA)		I			II			III			IV			K	Rp																								
				K	9	K	10	K	11	K	12	Rp	13	K	14	Rp	15	K	16			Rp	17	K	18	Rp	19	K	20	Rp	21	K	22	Rp	23	K	24	Rp	25	K	26	Rp	27	K	28
7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Terlaksananya koordinasi, ketertarikan dan ketertarikan Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan dan ketertarikan umum di wilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, pelayanan perijinan, keselamatan, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketertarikan dan ketertarikan di wilayah kecamatan	bulan	12	6.500.000	4.999.755	3	3	125.000	3	1.934.400	3	2.600.000	12	4.650.400	100	93,19																												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																		100	95,08																										
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tempat Ruang Kondisi Baik	%	80	36.000.000	11.828.861	100	100	1.065.000	100	1.065.000	100	3.442.861	100	4.507.461	100	38,11																												
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengutusan Kepala Daerah																																												
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	16.000.000	11.828.861	3	3	1.065.000	3	1.065.000	3	3.442.861	12	4.507.861	100	38,11																												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																		100	38,11																										
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kearahman	%	1	33.774.900	17.789.974	660.000	1.850.640	7.983.215	7.865.465	17.759.220	100	99,83																																
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100			100	100		100		100				100																													

No./Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincing / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021						Capaian 2021						
					K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan : LPPD dan LKPD, evaluasi peraturan Desa, raker kepala desa dan Perdes, Pembinaan kades dan perangkat desa, dan pengisian kades dan perangkat desa, Pengisian BPD dan penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	Bulan	12	18.278.100	8.999.975	3	13	660.000	3	1.850.640	3	2.948.915	3	3.514.365	12	8.973.970	100	99,71
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan	bulan	12	15.496.800	8.789.999	3	3		3	4.434.300	3	4.351.000	12	4.351.000	12	8.785.300	100	99,95
					Jumlah	2.760.740.887	2.794.746.124	358.136.678	1.031.150.028	693.346.946	2.600.043.826	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN			100	99,83	PREDIKAT SANGAT TINGGI			
					Jumlah	2.760.740.887	2.794.746.124	358.136.678	1.031.150.028	693.346.946	2.600.043.826	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN			100	99,03	PREDIKAT SANGAT TINGGI			
					Jumlah	2.760.740.887	2.794.746.124	358.136.678	1.031.150.028	693.346.946	2.600.043.826	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM			89,66		PREDIKAT AKAN TERCAPI			

KETERANGAN PREDIKAT KEGIATAN:
 91% < 100% : Sangat Tinggi
 76% < 80% : Tinggi
 66% < 60% : Sedang
 51% < 40% : Rendah
 < 50% : Sangat Rendah

KETERANGAN PREDIKAT PROGRAM
 100% : Telah Tercapai
 60% - 99,99% : Akan Tercapai
 0% - 59,99% : Upaya Keras

Disusun :
 Tembung, 7 Januari 2022
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 CAMAT KRAINGAN

[Signature]
 SRI SUPARSA, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660418 199803 1 025

Dievaluasi :
 Tembung, 7 Januari 2022
 PI. KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

[Signature]
 RIPTO SUSILO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670427 198703 1 001

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Fasilitas Kunjungan Tamu
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kranggan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,47%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Capaian Kinerja : 83,07 % kategori Baik
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan
Capaian Kinerja : 95,24 % kategori Baik
3. Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

4. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
5. Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	na	na	83,00	83,50	84,00	71,83	71,83	83,07				98,89	AT
2	Persentase kepemilikan KTP-el	%	98,6	100	100	100	100	102	100	99,70	..			99,70	AT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	98	96	96,93	..			96,93	AT
4	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	91,67	100	..			100	TT
5	Persentase Sarana dan Prasarana kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	86				86	AT
6	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
7	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
8	Prosentase Tempat Ibadah kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	94,92	100				100	TT
9	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan	%	1	1	1	1	1	0	0	0,51				100	TT
10	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Telah Tercapai ada 6 terdiri dari:
 - 1) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dari tingkat Kecamatan
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang kurang profesional
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan ke desa-desa
 - 2) Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintahan kelurahan
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan lembaga masyarakat
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan
 - 3) Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip, desa, kecamatan dan unsur keamanan
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah lambatnya laporan kejadian
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penanganan laporan kejadian yang dilakukan dengan baik dan tepat waktu
 - 4) Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat ibadah
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi bangunan yang masih 75% secara umum dianggap baik
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- melakukan kerjabakti dan gotong royong secara rutin
- 5) Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kekurangan
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang tidak professional
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring dan pembinaan rutin ke desa-desa
 - 6) Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dari Tingkat Kecamatan
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang kurang professional
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembinaan dan pendampingan ke desa-desa
2. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 3 terdiri dari:
- 1) Persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP-El untuk segala urusan
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemic covid-19
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pengajuan KTP-El secara online
 - 2) Persentase Realisasi Penerimaan PBB
 - a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya daya pikir masyarakat akan pentingnya PBB bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya penanganan covid-19
 - c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin ke desa-desa
 - 3) Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi

Baik

- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah
- b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga asset kelurahan
- c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan

3. Capaian indikator dengan status Upaya Keras tidak ada

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Kranggan terdiri dari terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase laporan LPPD tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, Data Pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase desa/kelurahan tangguh bencana, Data Pokok Bidang Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak, dan Data Pokok Bidang Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Tabel 2.2.2.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Persepsi	Nilai Interval (NI)	Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 - 2, 5996	25 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 - 3, 064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan

4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kranggan selama 5 tahun terakhir.

Tabel. 2.2.2.1.1

Nilai IKM Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2021

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2017	n.a	-
2	2018	n.a	-
3	2019	71,83	C
4	2020	71,83	C
5	2021	83,07	B

Sumber : Kecamatan Kranggan Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kranggan dari Tahun 2017 sampai tahun 2018 masih nol karena belum melaksanakan IKM, kemudian di tahun 2019 baru melaksanakan dengan indeks 71,83 mendapat nilai C (Kurang Baik). Begitu juga di tahun 2020 masih dengan indeks 71,83 dengan nilai C (Kurang Baik). Sedangkan tahun 2021 terdapat kenaikan yaitu sebesar 83,07% dengan nilai B (Baik).

Berikut tabel hasil survey kepuasan masyarakat secara mandiri terhadap pelayanan pembuatan KK dan KTP :

Tabel 2.2.2.1.2

Pelayanan Pembuatan KK dan KTP pada Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,21	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,19	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,17	Baik
4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis	3,14	Baik

	pelayanan		
6	Kompetensi pelaksana	3,16	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,29	Baik
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,69	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,09	Baik
Nilai IKM		3,32	
Konversi Nilai IKM		83,07	

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.285	35.487	37.438	37.052	35.829
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	36.469	36.782	36.782	37.229	35.936
3	Persentase (%)	94	96,5	100	99,52	99,52

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2017 - 2020 cenderung fluktuatif, kemudian tahun 2021 menurun karena adanya penanganan virus corona.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat.

Tabel 2.2.2.2
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL
di Kecamatan Kranggan Tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1.	KRANGGAN	3.630	3.620	10
2.	BADRAN	3.217	3.209	8
3.	BENGKAL	2.924	2.911	13
4.	PARE	1.510	1.504	6
5.	NGUWET	2.149	2.142	7
6.	NGROPOH	2.303	2.300	3
7.	PENDOWO	3.451	3.444	7
8.	SANGGRAHAN	2.975	2.966	9
9.	KLEPU	2.155	2.147	8
10.	KEMLOKO	3.819	3.811	8
11.	GENTAN	3.417	3.400	17
12.	KRAMAT	1.419	1.412	7
13.	PURWOSARI	2.967	2.963	4
Jumlah		35.936	35.829	107

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah

penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.2.2.3.1

Persentase realisasi penerimaan PBB
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	685.837.583	669.631.595	727.059.608	593.043.154	991.938.690
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	714.788.143	743.686.453	744.687.622	620.174.243	1.023.381.592
3	Persentase (%)	95,95	90,04	97,63	95,63	96,93

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan . Sedangkan tahun 2020 sampai dengan 2021 ini adalah 95,31%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan segala sesuatu dilakukan untuk penanganan virus corona.

Tabel 2.2.2.3.2

Dengan tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Desa	Uraian				Persentase (%)
		Jumlah realisasi penerimaan PBB		Jumlah ketetapan PBB		
		SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	
1	Kranggan	1574	79.241.686	2174	92.135.854	86,01
2	Badran	1628	145.988.448	2569	164.531.586	88,73
3	Bengkal	2499	241.749.050	2499	241.749.050	100,00
4	Pare	1119	29.580.630	1375	29.580.630	100,00
5	Nguwet	2422	145.863.933	2422	145.863.933	100,00
6	Ngropoh	3446	31.557.912	3446	31.557.912	100,00
7	Pendowo	4294	52.193.851	4294	52.199.447	99,99

8	Sanggrahan	3093	42.823.123	3093	42.823.123	100,00
9	Klepu	2577	32.153.454	2577	32.153.454	100,00
10	Kemloko	4340	50.126.570	4340	50.126.570	100,00
11	Gentan	3751	51.054.217	3751	51.054.217	100,00
12	Kramat	2190	31.027.606	2190	31.027.606	100,00
13	Purwosari	3639	58.578.210	3639	58.578.210	100,00
JUMLAH			991.938.690		1.023.381.592	96,93

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

4. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKPDes diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu Bulan Oktober atas saran dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 2.2.2.4.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	9	10	4	11	12

2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	75	83,3	33,33	91,66	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif, karena pada tahun 2017 sampai tahun 2021 ini mengalami penurunan.

Tabel 2.2.2.4.2
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	Nomor RKP-Des	Tanggal RKP-Des	Keterangan
1.	Badran	5 Tahun 2021	14 Oktober 2021	Tepat waktu
2.	Bengkal	7 Tahun 2021	5 Oktober 2021	Tepat waktu
3.	Pare	6 Tahun 2021	27 Oktober 2021	Tepat waktu
4.	Nguwet	6 Tahun 2021	15 September 2021	Tepat waktu
5.	Ngropoh	4 Tahun 2021	27 Oktober 2021	Tepat waktu
6.	Pendowo	6 Tahun 2021	27 Oktober 2021	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	5 Tahun 2021	15 Oktober 2021	Tepat waktu
8.	Klepu	5 Tahun 2021	15 Oktober 2021	Tepat waktu
9.	Kemloko	4 Tahun 2021	5 Oktober 2021	Tepat waktu
10.	Gentan	7 Tahun 2021	14 Oktober 2021	Tepat waktu
11.	Kramat	5 Tahun 2021	12 Oktober 2021	Tepat waktu
12.	Purwosari	5 Tahun 2021	25 Oktober 2021	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

5. **Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris

barang. Rumus desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.5.1
Persentase Desa/kel yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa/kel yang tertib dalam pengelolaan asset	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa/kel	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 adalah 100%.

Tabel 5.2
Pengelolaan Aset Desa

NO	DESA	KETERANGAN
1	KRANGGAN	TERTIB
2	BADRAN	TERTIB
3	BENGKAL	TERTIB
4	PARE	TERTIB
5	NGUWET	TERTIB
6	NGROPOH	TERTIB
7	PENDOWO	TERTIB
8	SANGGRAHAN	TERTIB
9	KLEPU	TERTIB
10	KEMLOKO	TERTIB
11	GENTAN	TERTIB

12	KRAMAT	TERTIB
13	PURWOSARI	TERTIB

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.6.1
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	11	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	91,6	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 adalah 100%, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan yaitu Desa Ngropoh, kemudian di tahun 2019 sampai 2021 s/d tercapai 100%. Hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

Tabel 2.2.2.6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2021

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2021	Keterangan
1	Badran	17 Februari 2021	Tepat waktu
2	Bengkal	13 Januari 2021	Tepat waktu
3	Pare	8 Januari 2021	Tepat waktu
4	Nguwet	10 Februari 2021	Tepat waktu
5	Ngropoh	8 Januari 2021	Tepat waktu
6	Pendowo	14 Januari 2021	Tepat waktu
7	Sanggrahan	28 Januari 2021	Tepat waktu
8	Klepu	20 Januari 2021	Tepat waktu
9	Kemloko	23 Februari 2021	Tepat waktu
10	Gentan	11 Januari 2021	Tepat waktu
11	Kramat	8 Februari 2021	Tepat waktu
12	Purwosari	28 Januari 2021	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

7. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.2.2.7.1
Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	10	11	9	11	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	83,33	91,66	75	91,66	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66%, sedangkan 2019 mengalami penurunan menjadi 75% karena kegiatan yang belum selesai. Sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi 91,66% karena adanya pendampingan. Sedangkan untuk tahun 2021 dalah 100%.

Tabel 2.2.2.7.2
Penyelesaian Kegiatan

NO.	DESA	TANGGAL SELESAI
1	KRANGGAN	31 Desember 2021
2	BADRAN	31 Desember 2021
3	BENGKAL	31 Desember 2021
4	PARE	31 Desember 2021
5	NGUWET	31 Desember 2021
6	NGROPOH	31 Desember 2021
7	PENDOWO	31 Desember 2021
8	SANGGRAHAN	31 Desember 2021
9	KLEPU	31 Desember 2021
10	KEMLOKO	31 Desember 2021
11	GENTAN	31 Desember 2021
12	KRAMAT	31 Desember 2021
13	PURWOSARI	31 Desember 2021

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

8. **Persentase Penanganan Laporan Kejadian**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.8.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	11	17	5	3	7
2	Jumlah laporan kejadian	11	17	5	3	7
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2017 sampai Tahun cenderung selalu 100 % karena selalu ditindaklanjuti.

Tabel 2.2.2.8.2
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2021

NO	DESA/KEL	NAMA KEJADIAN	2021
1	Kranggan	Banjir, Longsor, tembok ambruk	3
2	Badran	-	-
3	Bengkal	-	-
4	Pare	Angin Puting Beliung	1
5	Nguwet	-	-
6	Ngropoh	Longsor	1
7	Pendowo	Banjir	1
8	Sanggrahan	-	-
9	Klepu	-	-
10	Kemloko	-	-
11	Gentan	-	-
12	Kramat	-	-
13	Purwosari	Longsor	1

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

9. Persentase Tempat Ibadah dalam kondisi baik

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik

- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase tempat ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.9.1
Persentase tempat ibadah kondisi baik
Kecamatan Kranggan, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah tempat ibadah kondisi baik	228	228	228	236	236
	- Islam	216	216	216	224	224
	- Kristen	12	12	12	11	11
	- Katholik	-	-	-	1	1
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah tempat ibadah	228	228	228	236	236
	% tempat ibadah kondisi baik	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tempat ibadah dalam kondisi baik adalah sebesar 100%.

Tabel 2.2.2.9.2
Tempat Ibadah di Kecamatan Kranggan Tahun 2021

NO	DESA/Kel	MASJID	MUSHOLA	GEREJA /CAPEL	VIHARA
1	Kranggan	8	12	4	-
2	Badran	7	8	-	-
3	Bengkal	11	11	-	-
4	Pare	4	8	-	-
5	Nguwet	5	8	1	-
6	Ngropoh	9	6	-	-
7	Pendowo	13	8	-	-
8	Sanggrahan	10	6	1	-

NO	DESA/Kel	MASJID	MUSHOLA	GEREJA /CAPEL	VIHARA
9	Klepu	9	6	1	-
10	Kemloko	17	5	3	-
11	Gentan	9	6	-	-
12	Kramat	10	5	-	-
13	Purwosari	12	11	2	-
J U M L A H		124	100	12	-

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

10. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.2.2.10.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	2	2	0	0	1

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	146	149	149	188	198
3	Persentase (%)	1,37	1,34	0	0	0,51

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat 0,51 %.

Tabel 2.2.2.10.2
Pelanggaran Disiplin Aparatur

NO.	DESA	JUMLAH PERANGKAT	JUMLAH PELANGGARAN
1	KRANGGAN	11	-
2	BADRAN	11	-
3	BENGKAL	12	-
4	PARE	11	-
5	NGUWET	13	-
6	NGROPOH	20	-
7	PENDOWO	19	-
8	SANGGRAHAN	16	-
9	KLEPU	12	1
10	KEMLOKO	19	-
11	GENTAN	23	-
12	KRAMAT	13	-
13	PURWOSARI	18	-
JUMLAH		198	1

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

11. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.11.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	100	100	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 100%.

Tabel 2.2.2.11.2
Penyelesaian APB-Desa

No	Nama Desa	No APBDes	Tanggal APBDes	Keterangan
1.	Badran	9 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
2.	Bengkal	8 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
3.	Pare	7 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
4.	Nguwet	7 Tahun 2021	15 september 2021	Tepat Waktu

5.	Ngropoh	5 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
6.	Pendowo	7 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	8 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
8.	Klepu	6 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
9.	Kemloko	6 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
10.	Gentan	10 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
11.	Kramat	6 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu
12.	Purwosari	6 Tahun 2021	31 desember 2021	Tepat waktu

Sumber : Dinpermades Kab. Temanggung, Tahun 2021 s/d triwulan IV

12. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2.12.1
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2017 – 2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	1	1	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	12	12	12	12	12
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 8,33%.

Tabel 2.2.2.12.2
Daftar Desa/kelurahan Tangguh Bencana

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	Rawan Bencana	Tangguh Bencana
1	Kranggan	V	-
2	Badran	V	-
3	Bengkal	V	-
4	Pare	V	-
5	Nguwet	-	-
6	Ngropoh	V	-
7	Pendowo	V	-
8	Sanggrahan	V	-
9	Klepu	V	-
10	Kemloko	V	-
11	Gentan	V	-
12	Kramat	V	-
13	Purwosari	V	V

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

13. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan.

Sarpras disebut layak jika memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan akses. Dan kondisi fisik bangunan 80% baik.

Rumus penghitungan dari presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak adalah jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras local kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.2.2.13.1
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak
Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak	14	15	14	16	18
2.	Jumlah sarpras local kelurahan	14	15	14	16	21
3.	% Sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	100	100	100	100	85,71

Sumber : Kelurahan Kranggan tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak adalah 85,71%.

Tabel 2.2.2.13.2
Daftar Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Kranggan Tahun 2017-2021

No	Nama Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kondisi Layak	Kondisi Tidak Layak
1	Lapen Aspal RW II	Layak	-
2	Rabat Beton Jalan RT 03 RW VI	Layak	-
3	Rehabilitasi Balai RW.VI	Layak	-
4	Membangun Balai RW II		Tidak Layak
5	Membangun Balai Rw VII		Tidak Layak
6	Membangun Balai RW III		Tidak Layak
7	Perbaiki Drainase RT.01 RW.V	Layak	-
8	Perbaiki Drainase RT.04 RW.IV	Layak	-
9	Perbaiki Drainase RT.04 RW.I	Layak	-
10	Perbaiki Drainase RT 03 RW IV	Layak	-
11	Rabat Beton RT 01 RW I	Layak	-
12	Pembangunan Rabat Beton RT.02 RT.04 RW.IV	Layak	-
13	Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW III Kenalan	Layak	-
14	PJU RT 03 RT 04 RW I	Layak	-
15	PJU ke Lokasi Makam Kemloko RW V	Layak	-
16	Talud RT 04 RW II	Layak	-
17	Rabat Beton RT.01 RW.II	Layak	-
18	Drainase RT.01 RW.II	Layak	-
19	Rabat Beton RT.03 RW.V	Layak	-
20	Drainase RT.02 RW.V	Layak	-
21	Rabat Beton RT.04 RW.I	Layak	-

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

14. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Rumus penghitungan dari presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.2.2.14.1
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	40	40	40	41	42
2.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan	40	40	40	41	42
3.	% Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Kranggan Tahun 2021 s/d triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah 100%.

Tabel 2.2.2.14.2
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Kranggan Tahun 2017-2021

No	Nama Lembaga	Jumlah Total Yang Ada	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
1	RT	29	29	0	100%
2	RW	7	7	0	100%
3	LPMK	1	1	0	100%
4	PKK	1	1	0	100%
5	KARANG TARUNA	1	1	0	100%
6	LINMAS	1	1	0	100%
7	POSYANDU	2	2	0	100%
JUMLAH		42	42	0	100%

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2021 s/d triwulan IV

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kranggan dari 16 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan
Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga masyarakat kurang menyadari akan perlunya mengurus KTP-el.

- Indikator persentase realisasi penerimaan PBB

Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menjadikan masyarakat kekurangan ekonomi.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan, antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan publik
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan.
- Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi termasuk teknologi informatika dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.
- Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kecamatan Kranggan.

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Kranggan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Kranggan.

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	25	Orang/bulan	2.505.835.091	A.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	25	Orang/bulan	2.505.835.091	DAU	
B. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kranggan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dinas	25	orang	9.175.000	B.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kranggan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dinas	25	orang	9.175.000		
C. Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kranggan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.000.000	C.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kranggan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000	DAU	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kranggan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000	C.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kranggan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.000.000	DAU	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Kec. Kranggan	4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 1	6 Bulan	7 66.936.000	1	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Kec. Kranggan	4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 1	6 Bulan	7 70.000.000	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kranggan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	28.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kranggan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	30.000.000	DAU
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kranggan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1	unit	30.000.000	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kranggan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1	unit	30.000.000	DAU
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	Unit	35.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	Pemeliharaan mebel	Kec. Kranggan	Jumlah mebel yang dipelihara /direhabilitasi	5	6	7	1	Pemeliharaan mebel	Kec. Kranggan	Jumlah mebel yang dipelihara /direhabilitasi	5	6	7	DAU
5	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Kec. Kranggan	Jumlah kendaraan yang dipelihara /direhabilitasi				5	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Kec. Kranggan	Jumlah kendaraan yang dipelihara /direhabilitasi	2	Unit	10.000.000	DAU
6							6							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kranggan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	163.282.800	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kranggan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	163.282.800	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	15.835.000	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	20.835.000	DAU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							

RANCANGAN AWAL RKPD 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1		3	4	5	6	7
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	13.200.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1		3	4	5	6	7	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	18.200.000	DAU

Tabel 2.4.2

Review terhadap Rancangan awal RKPd Tahun 2023

Keurahan Kranggan

RANCANGAN AWAL RKPd 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
A. Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kranggan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kranggan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000	DAU
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kranggan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kranggan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000	DAU
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kranggan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.566.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kranggan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.566.000	DAU
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	4.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	4.000.000	DAU
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	Laporan	5.000.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	Laporan	5.000.000	DAU
B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	10.000.000	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.000.000	DAU
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	92.934.000	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kranggan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Bulan	98.800.000	DAU
C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Kranggan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	4.000.000	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Kranggan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	4.000.000	DAU
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	Unit	15.000.000	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	Unit	15.000.000	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kranggan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	22	Unit	1.035.300.000		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kranggan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	22	Unit	1.035.300.000	DAU
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kranggan	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Unit	366.900.000		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kranggan	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Unit	366.900.000	DAU

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Koordiasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Koordiasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
12	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sumber : Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kranggan. Namun dalam proses ini Kecamatan Kranggan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	Peningkatan kapasitas Jembatan Kali Belik/Kayen (ruas jalan Sanggrahan-Kemloko)	Desa Klepu	Memperlancar Akses Perekonomian	1 Unit	Pagu : Rp. 700.000.000,-
2	Penerangan jalan Nguwet-Pare (Ruas Jalan Pare-Nguwet No. 33.23.199)	Desa Nguwet	Memperlancar Akses Perekonomian	5 Unit	Pagu : Rp. 75.000.000,-
3	Peningkatan Kapasitas kader Posyandu dan Pembinaan KIP dan BKR	Desa Pendowo	Terciptanya kegiatan kesehatan masyarakat secara optimal	1 Kegiatan	Pagu : Rp. 87.000.000,-
4	Penyediaan sarana prasarana POSYANDU	Kelurahan Kranggan	Peningkatan kapasitas Posyandu	1 Kegiatan	Pagu : Rp. 105.000.000,-
5	Pelatihan Ketrampilan ekonomi produktif Kelompok miskin dan RTM	Desa Kemloko	Pelatihan Ketrampilan ekonomi produktif kelompok miskin dan RTM	1 Kegiatan	Pagu : Rp. 100.000.000,-

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kranggan ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasar Caping Bengkulu	Kelompok Tani Desa Bengkulu	Swadaya	Penyaluran hasil panen masyarakat yang terdiri dari sayur segar dan olahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk kebutuhan sehari-hari. Akses jual beli lebih dekat.	Hasil produk pertanian	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Petani di Desa Bengkulu – 2019
2	Pasar Pare	Pemerintah Desa Pare	Swadaya	Penyaluran hasil panen masyarakat yang terdiri dari sayur segar dan olahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk kebutuhan sehari-hari.	Hasil produk pertanian	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Petani Desa Pare – 2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kranggan belum ada.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kranggan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kranggan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan,
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kranggan dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kranggan,

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI KECAMATAN KRANGGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM									
MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelaynsan Publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	-	-		
				Persentase Laporan LPPD tepat waktu	%	100	100		
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	75	75		
				Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Ketertarikan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
						Persentase pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,03	0
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Ketertarikan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketertarikan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	0	0
						Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	%	100
Program Penyelenggaraan urusan Umum	Program Penyelenggaraan urusan Umum	Meningkatnya Ketertarikan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	%	75			

Sumber : Perubahan renstra Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2023

Rancangan RENJA Kecamatan Kranggan tahun 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.652.491.913	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.896.966.988
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.445.991.913	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.505.835.091
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.991.913		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.505.835.091
c	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		c	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.175.000
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	9.175.000
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.000.000	d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.103.097
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.543.097
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.560.000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.500.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.536.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.936.000

f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.282.800	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	72.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	163.282.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	163.282.800	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.835.000	
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.835.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.835.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.200.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	12.500.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH	-
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	11.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	-
	JUMLAH TOTAL	2.824.191.913	JUMLAH TOTAL	2.896.966.988

Sumber : RKPD Kab. Tembung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 72.775.075,-.

Tabel 4.2.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pencertahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Data
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG						2.896.966.988	2.460.059.068	2.678.014.930	2.622.007.148	97,91	3.476.360.386	DAU
7 01 01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%			2.704.649.188	2.277.232.868	2.495.942.930	2.448.172.407	98,09	3.245.576.026	DAU
7 01 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.505.835.091	2.119.781.771	2.351.830.229	2.320.039.466	98,65	3.007.002.109	DAU
7 01 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan	22	Orang/bulan		2.505.835.091	2.119.781.771	2.351.830.229	2.320.039.466	98,65	3.007.002.109	
7 01 01 205	Peningkatan Disiplin dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur						9.175.000	-	-	-	-	11.010.000	DAU
7 01 01 206 02	Pengadaan pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Meningkatnya pelayanan dengan pakaian dinas	Kec. Kranggan	22	Orang		9.175.000	-	-	-	-	11.010.000	
7 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.103.097	40.999.905	27.564.863	21.832.443	79,20	55.323.716	DAU
7 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Paket		3.000.000	3.000.000	3.136.400	3.127.700	99,72	3.600.000	
7 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Paket		10.000.000	7.999.905	6.718.088	6.572.845	97,84	12.000.000	
7 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Paket		9.543.097	5.000.000	2.973.375	2.335.100	78,53	11.451.716	
7 01 01 206 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	Kec. Kranggan	1	Laporan		13.560.000	15.000.000	7.754.000	6.744.000	86,97	16.272.000	

7 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kranggan	I	Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.983.000	3.052.798	43,72	12.000.000
7 01 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.536.000	97.953.092	85.136.138	995.000	79.750.098	93,67	102.643.200
7 01 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kranggan	I	Laporan	1.000.000	5.000.000	1.000.000	995.000	900.000		1.200.000
7 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kranggan	I	Laporan	12.600.000	10.999.992	12.600.000	12.600.000	7.891.338	62,63	15.120.000
7 01 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	I	Laporan	5.000.000	6.956.400	5.000.000	4.910.400	4.910.400	100,00	6.000.000
7 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	I	Bulan	66.936.000	74.996.700	66.936.000	66.630.738	66.048.360	99,13	80.323.200
7 01 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000	18.498.100	58.000.000	31.411.700	26.550.400	84,52	69.600.000
7 01 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Kranggan	8	Unit	28.000.000	18.498.100	28.000.000	18.497.000	17.554.900	94,91	33.600.000
7 01 01 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kranggan	I	Unit	30.000.000	-	30.000.000	8.995.500	8.995.500	100,00	36.000.000
7 01 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kec. Kranggan									

7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	1	Laporan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	23.199.700	22.496.500	96,97	15.840.000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								4.793.955	4.659.400	97,19	-	DAU
7	01	04	201	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							4.793.955	4.659.400	97,19	-	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								11.828.861	4.507.861	38,11	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah								11.828.861	4.507.861	38,11	-	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal								11.828.861	4.507.861	38,11	-	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								17.789.974	17.759.220	99,83	-	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								17.789.974	17.759.220	99,83	-	
7	01	06	2.01	02	Facilitasi administrasi tata pemerintahan Desa								8.999.975	8.973.920	99,71	-	

Tabel 4.2.2
Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Tar get Kin erja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	URUSAN KECAMATAN											
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)										
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7 1 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kranggan	12	Paket	2.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	100	2.200.000	DAU
7 1 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kel. Kranggan	12	Paket	4.000.000	5.000.000	2.052.977	1.861.396	91	4.400.000	DAU
7 1 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kranggan	12	Paket	3.566.000	6.000.000	2.618.080	2.454.400	94	3.922.600	DAU
7 1 1 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Kel. Kranggan	12	Laporan	4.000.000	3.000.000	1.977.552	1.325.075	67	4.400.000	DAU
7 1 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kel. Kranggan	1	Laporan	5.000.000	5.000.000	2.273.500	2.273.500	0	5.500.000	DAU
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Barang Mebel	Tersedianya mebel kantor	Kel. Kranggan	0	unit	-	0	0	0	0	-	DAU
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Kranggan	0	unit	-	0	0	0	0	-	DAU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kranggan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kranggan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kranggan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,65 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0%, belanja barang dan jasa sebesar 92,58% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 42,22% realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja barang dan jasa sebesar 21,62%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kranggan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.464.478.668 yang terdiri dari 4 Program antara lain Program penunjang urusan pemerintah daerah; Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Program pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan dan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19660418 199803 1 005

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2023
KECAMATAN KRANGGAN**

SUMBER DANA : DAU

KODE REKENING	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Total	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prekiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan			Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran	Realisasi			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2.896.966.988	2.460.059.068	2.678.014.930	2.622.007.148	97,91	3.476.360.386	DAU
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA			%			2.704.649.188	2.277.232.868	2.495.942.930	2.448.172.407	98,09	3.245.579.026	DAU
7 01 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.605.835.091	2.119.781.771	2.351.830.229	2.320.039.466	98,65	3.007.002.109	DAU
7 01 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan	25	Orang		2.505.835.091	2.119.781.771	2.351.830.229	2.320.039.466	98,65	3.007.002.109	
7 1 1 205	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						9.175.000					11.010.000	DAU
7 1 1 205 02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dinas	Kec. Kranggan	25	Orang		9.175.000					11.010.000	
7 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.103.097	40.999.906	27.564.863	21.832.443	79,20	55.323.716	DAU
7 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Paket		3.000.000	3.000.000	3.136.400	3.127.700	99,72	3.600.000	
7 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Paket		10.000.000	7.499.905	6.718.088	6.572.845	97,84	12.000.000	
7 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Paket		9.543.097	5.100.000	2.973.375	2.335.100	78,53	11.451.716	
7 01 01 206 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kranggan	1	Laporan		13.560.000	15.100.000	7.754.000	6.744.000	86,97	16.272.000	
7 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kranggan	1	Laporan		10.000.000	10.000.000	6.983.000	3.052.798	43,72	12.000.000	
7 01 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85.536.000	97.953.092	85.136.138	79.750.098	93,67	102.643.200	DAU
7 01 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kranggan	1	Laporan		1.000.000	5.000.000	995.000	900.000		1.200.000	
7 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Laporan		12.600.000	10.999.992	12.600.000	7.891.338	62,63	15.120.000	
7 01 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Laporan		6.000.000	6.956.400	4.910.400	4.910.400	100,00	6.000.000	
7 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kranggan	1	Bulan		66.936.000	74.996.700	66.630.738	66.048.360	99,13	80.323.200	
7 01 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000	18.418.100	31.411.700	26.550.400	84,52	69.600.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 01 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Kranggan	8	Unit	28.000.000	28.000.000	18.498.100	18.497.000	17.554.900	94,91	33.600.000	
7 01 01 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kranggan	1	Unit	30.000.000	30.000.000	-	8.995.500	8.995.500	100,00	36.000.000	
7 01 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kec. Kranggan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 01 01 2 09 05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kranggan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kranggan	-	-	-	-	-	3.919.200	3.878.900	98,97	-	-
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					163.282.800	163.282.800	130.626.200	107.732.505	107.732.505	100,00	195.939.360	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan					-	-	-	5.760.630	5.760.630	100,00	-	-
7 01 02 201 02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan					-	-	-	5.760.630	5.760.630	100,00	-	-
7 01 02 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					163.282.800	163.282.800	130.626.200	101.971.875	101.971.875	100,00	195.939.360	DAU
7 01 02 204 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kranggan	1	Laporan	163.282.800	163.282.800	130.626.200	101.971.875	101.971.875	100,00	195.939.360	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.835.000	15.835.000	35.000.000	16.727.005	16.679.255	99,71	19.002.000	DAU
7 01 03 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					15.835.000	15.835.000	35.000.000	16.727.005	16.679.255	99,71	19.002.000	DAU
7 01 03 201 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	1	Laporan	15.835.000	15.835.000	35.000.000	16.727.005	16.679.255	99,71	19.002.000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000	13.200.000	13.200.000	27.993.655	27.155.900	97,01	15.840.000	DAU
7 01 04 201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	13.200.000	13.200.000	23.199.700	22.496.500	96,97	15.840.000	DAU
7 01 04 201 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Kec. Kranggan	1	Laporan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	23.199.700	22.496.500	96,97	15.840.000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					-	-	-	4.793.955	4.659.400	97,19	-	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 01 04 201 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							4.793.955	4.659.400	97,19	-	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN JUMUM								11.828.861	4.507.861	38,11	-	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah								11.828.861	4.507.861	38,11	-	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal								11.828.861	4.507.861	38,11	-	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							4.000.000	17.789.974	17.759.220	99,83	-	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa							4.000.000	17.789.974	17.759.220	99,83	-	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa							4.000.000	8.999.975	8.973.920	99,71	-	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								8.789.999	8.785.300	99,95	-	
							2.896.966.988	2.460.059.068	2.678.014.930	2.622.007.148	97,91	3.476.360.386	

Keterangan : Sudah disesuaikan dengan hasil desk di BAPPEDA tanggal 2 Juni 2022

TELAH DIVERIFIKASI BAPPEDA

Jabatan	Tanggal	Paraf
Koordinator	2/6-22	
Sub. Koordinator	2/6-22	
Anggota	2/6-22	

Kranggan, 2 Juni 2022
CAMAT KRANGGAN


SERUSUHARSA, SH
Pembina Tk I

NIP. 19660418 199803 1 005

RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2023

PD : KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN
SUMBER DANA : DAU

KODE REKENING	Unsur/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022		Kinerja Anggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi	Realisasi	Alokasi	%		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1	URUSAN KECAMATAN											
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)										
7 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7 1 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kranggan	12	Paket	2,000,000	3,500,000	2,000,000	2,000,000	100	2,200,000	DAU
7 1 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kel. Kranggan	12	Paket	4,000,000	5,000,000	2,052,977	1,861,956	91	4,400,000	DAU
7 1 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Kranggan	12	Paket	3,566,000	6,000,000	2,618,080	2,454,400	94	3,922,600	DAU
7 1 1 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tertakutannya fasilitas kunjungan tamu	Kel. Kranggan	12	Laporan	4,000,000	3,000,000	1,977,552	1,325,075	67	4,400,000	DAU
7 1 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertakutannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kel. Kranggan	1	Laporan	5,000,000	5,000,000	2,273,500	2,273,500	0	5,500,000	DAU
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Kel. Kranggan	0	unit	-	0	0	0	0	-	DAU
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Kranggan	0	unit	-	0	0	0	0	-	DAU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7 1 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertakutannya penyediaan jasa surat menyurat	Kel. Kranggan	12	Laporan	0	0	0	0	0	-	DAU
7 1 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kranggan	12	Laporan	10,000,000	9,000,000	8,520,000	6,663,635	78	11,000,000	DAU
7 1 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kranggan	12	Laporan	91,934,000	73,966,482	76,597,000	64,079,235	84	102,227,400	DAU
	Tenaga IT	2 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.900.000				45.600.000						
	Petugas Kebersihan	1 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.800.000				21.600.000						
	Petugas Jaga Malam	1 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.750.000				21.000.000						
	Penyediaan Jasa Kesehatan, JKK, JKM	4 Orang x 12 Bulan				4.734.000						
7 01 1 2.09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7 1 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Kranggan	2	unit	4,000,000	5,000,000	3,000,000	2,963,500	99	4,400,000	DAU
7 1 1 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	2	unit	15,000,000	0	10,000,000	9,980,316	100	16,500,000	DAU
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	6	unit	0	0	0	0	0	-	DAU
7 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	4	unit	0	0	0	0	0	-	DAU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
7 1 1 2.05	Pengadaan pakalan Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya pelayanan dengan pakalan dinas	Kel. Kranggan	0	paket		0	0	0	0	2,000,000	DAU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik										
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif										
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya sarana prasarana kelurahan	Kel. Kranggan	22	unit	1,035,300,000	639,087,000	239,949,000	238,160,600	99.25	1,138,830,000	DAU
						60,000,000						
						53,000,000						
						45,000,000						
						21,000,000						
						20,000,000						
						14,000,000						
						50,000,000						
						21,960,000						
						33,000,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK		45,000,000									
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum											
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kel. Kranggan	1	Laporan	0	0	26,000,000	26,000,000	100.00	0	DAU
JUMLAH						1,542,700,000	1,071,873,482	706,615,980	636,688,911	90.10	-	DAU

Temanggung, Mei 2022
LURAH KRANGGAN

IMAM BUDDY SANTOSA
NIP.19650823 198610 1 004

TELAH DIVERIFIKASI BAPPEDA

Jabatan	Tanggal	Paraf
Koordinator	2/6-22	<i>[Signature]</i>
Sub Koordinator	2/6-22	<i>[Signature]</i>
Anggota	2/6-22	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

Jl. Raya Kranggan-Kaloran KM 1 Telp. (0293) 492677 Kode Pos 56271
KRANGGAN

KEPUTUSAN CAMAT KRANGGAN
NOMOR 050/18 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

CAMAT KRANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Rencana Kerja PD Kecamatan Kranggan setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dearah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan materi Rencana Kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing;
 2. Menghadiri dan mengikuti setiap rapat penyusunan Rencana Kerja PD;
 3. Mengoreksi dan meneliti rencana target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 4. Bertanggung jawab atas data dan diinformasi yang disampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Juni 2022

CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660428 1999803 1 005

Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KRANGGAN
NOMOR : 050/18 TAHUN 2022
TANGGAL : Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PD
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SERI SUHARSA, SH	CAMAT	KETUA
2	R. BADAR WALUYO, SH,MM	SEKCAM	SEKRETARIS
3	FULUSUDIN, S.A.P	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
4	PARYATI, S.Sos	KASI PMD	ANGGOTA
5	ISHADI	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ANGGOTA
6	TETY NURLIYANTI, S.Sos	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
7	JOKO TRI ANGGOR, S.A.P	SEKRETARIS KELURAHAN KRANGGAN	ANGGOTA
8	ROVIK BUDIARTO, SE	BENDAHARA KECAMATAN	ANGGOTA

CAMAT KRANGGAN,



SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660428 1999803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

Jl. Raya Kranggan-Kaloran KM 1 Telp. (0293) 492677 Kode Pos 56271
KRANGGAN

KEPUTUSAN CAMAT KRANGGAN
NOMOR 050/18 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

CAMAT KRANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Rencana Kerja PD Kecamatan Kranggan setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dearah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan materi Rencana Kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing;
 2. Menghadiri dan mengikuti setiap rapat penyusunan Rencana Kerja PD;
 3. Mengoreksi dan meneliti rencana target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 4. Bertanggung jawab atas data dan diinformasi yang disampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Juni 2022

CAMAT KRANGGAN



SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660428 1999803 1 005

Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KRANGGAN
NOMOR : 050/18 TAHUN 2022
TANGGAL : Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PD
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SERI SUHARSA, SH	CAMAT	KETUA
2	R. BADAR WALUYO, SH,MM	SEKCAM	SEKRETARIS
3	FULUSUDIN, S.A.P	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
4	PARYATI, S.Sos	KASI PMD	ANGGOTA
5	ISHADI	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ANGGOTA
6	TETY NURLIYANTI, S.Sos	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
7	JOKO TRI ANGGOR, S.A.P	SEKRETARIS KELURAHAN KRANGGAN	ANGGOTA
8	ROVIK BUDIARTO, SE	BENDAHARA KECAMATAN	ANGGOTA

CAMAT KRANGGAN,

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660428 1999803 1 005